

PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KOTA PEKANBARU

THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGE IN TEBING TINGGI OKURA SUBDISTRICT, PEKANBARU CITY

Wahyu Ainurrahmansyah¹, Dadang Mashur²

^{1,2} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: Wahyu.ainurrahman10@gmail.com, dadangmashur@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam mendukung potensi wisata berbasis budaya dan alam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang meratanya pelaksanaan peran *stakeholder*, yang mengakibatkan ketergantungan terhadap objek wisata tunggal serta belum terintegrasinya potensi lokal secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran para *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Biddle & Thomas dalam (Sarwono, 2014) yang mencakup Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, Kaitan antara orang dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* seperti pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat telah berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing, namun masih terdapat kesenjangan antara harapan normatif dengan realisasi peran di lapangan, terutama dalam aspek pemberdayaan kelompok kesenian dan ekonomi kreatif masyarakat lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor yang lebih kuat serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: Peran *Stakeholder*, Pengembangan Pariwisata, Kampung Wisata

Abstract: The development of Kampung Wisata in Tebing Tinggi Okura Village, Pekanbaru City involves various stakeholders who have a strategic role in supporting cultural and nature-based tourism potential. This research was motivated by the uneven implementation of stakeholder roles, which resulted in dependence on a single tourist attraction and the lack of integration of local potential as a whole. The purpose of this research is to describe the role of stakeholders in the development of Okura Tourism Village and identify the obstacles faced. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and document studies. The data analysis technique used is through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The theory used is role theory according to Biddle & Thomas in (Sarwono, 2014) which includes People who take part in social interactions, Behaviours that arise in these interactions, The position of people in behaviour, The link between people and behaviour. The results showed that stakeholders such as the government, private sector, academia, media, and the community have contributed according to their respective capacities, but there is still a gap between normative expectations and the realisation of roles in the field, especially in the aspect of empowering arts groups and the creative economy of local communities that have the potential to be developed as a cultural-based tourist attraction and creative economy. Therefore, stronger cross-sectoral synergy and institutional capacity strengthening are needed to realise sustainable and competitive tourism development.

Keywords: Role of Stakeholders, Tourism Development, Tourism Village



PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu isu strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Secara empiris, sektor tersebut terbukti mampu meningkatkan penerimaan devisa negara melalui kunjungan wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah yang berasal dari aktivitas pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata mampu untuk diandalkan sebagai katalisator bagi sektor-sektor terkait, seperti transportasi, perhotelan, kuliner, dan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, Sektor pariwisata juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata (Aliansyah & Hermawan, 2021).

Salah satu daerah yang turut mengupayakan pengembangan sektor pariwisata di wilayahnya adalah Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau. Komitmen tersebut dapat dibuktikan melalui adanya upaya pengembangan destinasi wisata yang berbasis pada konsep desa/kampung wisata. Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia (Pardede *et al.*, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi lokal, baik dari aspek budaya, alam, maupun ekonomi kreatif masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, saat ini tercatat setidaknya terdapat empat kampung wisata yang telah dikembangkan di wilayah administrasi kota tersebut dan dapat dilihat melalui pemaparan berikut:

Tabel 1.1 Kampung Wisata di Kota Pekanbaru

No	Kampung Wisata	Tingkatan
1.	Kampung Wisata Okura	Berkembang
2.	Kampung Wisata Bandar Senapelan	Rintisan
3.	Kampung Wisata Agrowisata	Rintisan
4.	Kampung Wisata Pengambang Jaya	Rintisan

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2025

Dari keempat kampung wisata sebagaimana yang telah dipaparkan pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Kampung Wisata Okura memiliki tingkatan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan tiga kampung wisata lainnya yang terdapat di Kota Pekanbaru. Penetapan Kampung Wisata Okura secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pekanbaru Nomor 333 Tahun 2021, yang menetapkan Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebagai Kampung Budaya Ramah Muslim. SK ini memperkuat upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPADA), khususnya Pasal 21 yang menekankan pentingnya pemanfaatan daya tarik wisata sejarah dan budaya sebagai fondasi pembangunan daya tarik wisata daerah.

Dalam rangka mempercepat pengembangan Kampung Wisata Okura, kemudian diterapkan skema kerjasama yang melibatkan sejumlah *stakeholder* melalui pelaksanaan suatu peran yang beragam dan disesuaikan dengan norma, kedudukan, kewenangan tugas dan fungsi dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Dalam hal ini, adapun *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan Kampung Wisata Okura adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

- Pekanbaru dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang berperan dalam pengukuhan, pembinaan, dan pelatihan masyarakat.
2. Lurah Kelurahan Tebing Tinggi Okura, yang berperan sebagai penghubung dan koordinator antar *stakeholder*.
 3. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan, berperan dalam mendanai pembangunan infrastruktur melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 4. Riau Televisi (RTV) dan akademisi dari Universitas Lancang Kuning (UNILAK), yang terlibat dalam promosi digital dan pelatihan konten wisata.
 5. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Taman Bunga Impian Okura, berperan sebagai pengelola utama kegiatan kepariwisataan di Kampung Wisata Okura.
 6. Kelompok kesenian seperti Siraja Panjang, Badeo Kayangan, serta Kelompok PIRLI, yang mengelola potensi budaya kompiang, silat tradisional, tarian badeo dan kerajinan tangan lidi sawit.
 7. Masyarakat lokal, sebagai subjek sekaligus objek dalam pengembangan wisata.

Meskipun saat ini telah terjalin kerja sama yang melibatkan peranan dari sejumlah *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura, namun pada kenyataannya realisasi pengembangan kampung wisata tersebut masih belum terlaksana secara optimal. Dalam hal ini pengembangan Kampung Wisata Okura belum menunjukkan integrasi daya tarik wisata secara optimal. Ketergantungan terhadap satu objek wisata, yaitu Taman Bunga Impian Okura, menjadi indikator lemahnya pemanfaatan potensi budaya lokal seperti kesenian kompiang, silat, tarian badeo, serta kerajinan lidi sawit yang dikelola oleh kelompok lokal. Padahal, kelompok tersebut memiliki kapasitas dan kreativitas yang tinggi untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif.

Situasi tersebut kemudian mencerminkan kesenjangan antara kondisi normatif sebagaimana yang dijelaskan dalam

SK Wali Kota Pekanbaru Nomor 333 Tahun 2021 dan PERDA RIPPARDA Kota Pekanbaru dengan realitas di lapangan. Rendahnya perhatian *stakeholder* terhadap pelaku budaya lokal dan belum adanya event atau mekanisme promosi yang mendukung keterlibatan kelompok tersebut, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan destinasi wisata yang inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, dibutuhkan peran aktif dan sinergi dari berbagai *stakeholder*, baik pemerintah, swasta, akademisi, media, maupun masyarakat lokal, dalam memanfaatkan potensi yang ada guna mengoptimalkan pengembangan Kampung Wisata Okura.

Dengan demikian, penting untuk dilakukan kajian yang menelaah bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* dalam mendukung pengembangan Kampung Wisata Okura, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peran tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pola interaksi, kontribusi, serta peluang kolaborasi antar *stakeholder* dalam mewujudkan kampung wisata yang mandiri, mengintegrasikan berbagai daya tarik wisata, dan juga berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena topik yang dibahas berhubungan dengan fenomena sosial yang perlu dijelaskan secara mendalam dan deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami makna dari berbagai pengalaman dan pandangan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Kampung Wisata Okura. Seperti yang dijelaskan oleh Sari (2023), bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya penulis tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan maksud dan tujuan yang ditentukan oleh peneliti.

Sampel ditentukan oleh orang yang telah mengenal populasi yang akan diteliti (Goa, 2022). Artinya, informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengembangan kampung wisata, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles *et al.* (2014), yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap situasi yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, sebagai lokasi utama. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama sembilan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, penulis berupaya memahami langsung dinamika di lapangan serta menggali informasi dari para pihak yang terlibat, guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang peran *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mulyadin dalam Rosa *et al.* (2021) desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari perdesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Dalam konteks pengembangan Kampung Wisata Okura, upaya tersebut kemudian melibatkan sejumlah *stakeholder* yang melakukan suatu peranan yang beragam dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, norma, kedudukan kewenangan dari para *stakeholder* yang terlibat. Rahmi dalam Ginting Grace, Kismartini, Yuningsih Tri (2021) menyatakan bahwa terdapat tiga *stakeholder* yang memainkan peran utama dalam mengembangkan sektor pariwisata, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak pemerintah, perusahaan atau pihak swasta, dan juga masyarakat.

Menurut Hartono & Hunt dalam Putri & Jatningsih (2020) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status, sedangkan *stakeholder* merupakan setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi (Setiawan & Nurcahyanto, 2020). Sedangkan menurut Rukmana dalam Firdausi & Ananda (2025), peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan secara spesifik disampaikan kepada seseorang/kelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peran para *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan peran tersebut, maka pembahasan ini dianalisis dengan menggunakan kerangka teori peran yang dikemukakan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014) yang membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, adapun pembagian golongan tersebut terdiri atas:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;



2. Perilaku yang meuncil dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peran Stakeholder dalam Pengembangan Kampung Wisata Okura

Salah satu contoh penerapan konsep peran dalam pembangunan pariwisata dapat dilihat pada Kampung Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kota Pekanbaru. Dalam konteks ini, pengembangan Kampung Wisata Okura melibatkan tiga kelompok *stakeholder* utama, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, masing-masing pihak tersebut memiliki perannya sendiri dalam mendukung keberlanjutan wisata di kawasan tersebut.

1. Orang-Orang Yang Mengambil Bagian Dalam Interaksi Sosial

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2014) konsep orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu sistem sosial, baik sebagai pelaku aktif (aktor) maupun pihak yang menjadi sasaran (target) dari suatu tindakan atau kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengembangan Kampung Wisata Okura melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan target berbeda dalam mendukung kemajuan kawasan wisata. Dalam proses implementasi pengembangan Kampung Wisata Okura, keterlibatan berbagai *stakeholder* menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan. Setiap pihak berperan sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan bidang tanggung jawabnya, membentuk pola kerja sama yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan program pengembangan wisata berbasis komunitas ini.

Dari unsur pemerintah, terdapat tiga lembaga utama yang berperan aktif, yakni Lurah Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Ketiganya menjalankan fungsi strategis dalam proses perencanaan, fasilitasi, dan

pengorganisasian kegiatan, termasuk dalam hal pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat serta penetapan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata daerah.

Di sisi lain, sektor swasta juga mengambil bagian dalam mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan, melalui program CSR, telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan infrastruktur penunjang wisata, seperti pembangunan taman edukasi, pendopo, dan fasilitas umum lainnya. Dukungan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara dunia usaha dan masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan wisata berbasis lokal.

Selanjutnya, dari kalangan akademisi dan media, keterlibatan dosen dari Fakultas Ilmu Komputer UNILAK memberikan penguatan kapasitas melalui pelatihan promosi digital dan pengelolaan konten media sosial. Upaya ini didukung oleh Riau Televisi (RTV) yang membantu dalam menyebarkan informasi melalui liputan televisi sebagai media promosi yang efektif untuk menjangkau publik yang lebih luas.

Tidak kalah penting, unsur masyarakat lokal menjadi tulang punggung utama dalam pengembangan Kampung Wisata Okura. Peran tersebut diemban oleh POKDARWIS Taman Bunga Impian Okura yang bertindak sebagai pengelola utama kawasan. POKDARWIS didukung oleh sejumlah komunitas budaya dan pelaku ekonomi kreatif seperti Kelompok Kompang dan Silat Tradisional Siraja Panjang, Kelompok Tarian Badeo Kayangan, serta Kelompok PIRLI (Pengrajin Piring Lidi), yang masing-masing menyumbangkan kekayaan seni, tradisi, dan kerajinan sebagai daya tarik wisata unggulan.

Dengan demikian, keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menunjukkan bentuk kolaborasi nyata yang mencerminkan semangat partisipatif dan integratif. Sinergi yang terjalin antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan ekosistem wisata yang inklusif,

berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal yang otentik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa para *stakeholder* menargetkan beberapa kelompok utama, terutama masyarakat setempat yang diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari sektor pariwisata. Selain itu, wisatawan menjadi sasaran penting dalam meningkatkan kunjungan dan memperkuat identitas kawasan sebagai destinasi wisata unggulan. Generasi muda juga menjadi target strategis, baik sebagai penerus pelestarian budaya maupun sebagai bagian dari upaya menciptakan inovasi dalam pengelolaan wisata.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan kawasan wisata ini bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan adanya keterlibatan yang saling mendukung, diharapkan pengelolaan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan dampak ekonomi yang positif, serta memperkuat identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

2. Perilaku yang Muncul dalam Interaksi Tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kota Pekanbaru, melibatkan beragam *stakeholder* yang memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, media, serta komunitas lokal berkolaborasi dalam mendorong transformasi kawasan ini menjadi destinasi wisata yang berbasis budaya dan alam.

Dalam konteks harapan *stakeholder*, hampir seluruh pihak yang terlibat menginginkan terciptanya sinergi lintas sektor dalam pengembangan kampung wisata. Pihak komunitas budaya dan kelompok kerajinan mengharapkan dukungan konkret dalam bentuk fasilitas, pelatihan, dan promosi, sedangkan pihak pemerintah dan swasta berharap adanya partisipasi aktif masyarakat

dalam mengembangkan potensi yang ada.

Dari sisi norma, pelaksanaan peran *stakeholder* sebagian besar dijalankan berdasarkan kesadaran kolektif, nilai-nilai gotong royong, serta landasan regulasi seperti Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 333 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang RIPPARDA. Kemudian juga terdapat beberapa pihak seperti POKDARWIS Taman Bunga Impian Okura yang melaksanakan peranan berlandaskan Surat Keputusan (SK) Lurah Tebing Tinggi Okura Nomor 13/KPTS/TTO/VII/2023. Selain itu PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan juga melaksanakan suatu peranan yang didasari pada kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program CSR.

Perilaku *stakeholder* juga tercermin dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan taman wisata, pelatihan sapta pesona, hingga program CSR dari PT PLN Nusantara Power. Kegiatan ini mengindikasikan keterlibatan aktif, meski belum sepenuhnya optimal dan terintegrasi secara merata pada semua lini daya tarik wisata. untuk melihat lebih lengkap terkait bagaimana peran yang sudah dilakukan oleh para *stakeholder* maka dapat dilihat melalui tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Peran *Stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i> yang Terlibat	Peranan
1.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru (DISBUPDAR)	Memberikan pelatihan pengelolaan objek wisata terhadap POKDARWIS dan sejumlah masyarakat Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang dilaksanakan secara berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, merekomendasikan penetapan Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebagai Kampung Wisata, sekaligus mengukuhkan pembentukan POKDARWIS taman Bunga Impian Okura.
2.	Dinas Pariwisata Provinsi Riau (DISPAR)	Memberikan pelatihan pengelolaan objek wisata terhadap POKDARWIS Taman Bunga Impian Okura yang dilaksanakan secara berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
3.	Lurah Kelurahan Tebing Tinggi Okura	Mengkoordinasikan sejumlah <i>Stakeholder</i> sewaktu melaksanakan suatu kegiatan ataupun program pengembangan Kampung Wisata Okura.
4.	PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan	Melaksanakan Program CSR di Taman Bunga Impian Okura berupa pendanaan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang kepariwisataan.
5.	Riau Televisi	Membuat liputan berita promosi kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
6.	Dosen Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning	Melakukan kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan membuat konten promosi wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura

No	<i>Stakeholder</i> yang Terlibat	Peranan
7.	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Taman Bunga Impian Okura	Mengelola Objek Wisata Taman Bunga Impian Okura sekaligus meningkatkan pemahaman kepariwisataan masyarakat.
8.	Kelompok kompang dan silat tradisional Siraja Panjang	Melestarikan budaya berupa alat musik kompang dan silat tradisional berbasis kelompok.
9.	Kelompok Tarian Badeo Kayangan	Melestarikan budaya berupa tarian badeo Kayangan berbasis kelompok.
10.	Kelompok PIRLI (Pengrajin Piring Lidi)	Memberdayakan masyarakat melalui pengolahan lidi sawit menjadi suatu produk siap pakai.
11.	Masyarakat	Mendukung pemenuhan kebutuhan wisatawan melalui usaha warung makan, toko kelontong, dan lainnya, serta pihak yang diharapkan merasakan dampak dari pelaksanaan peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Kampung Wisata Okura.

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Dalam hal penilaian dan evaluasi, masyarakat pada umumnya memberikan apresiasi terhadap kontribusi *stakeholder* tertentu, terutama POKDARWIS dan PT PLN, atas konsistensi mereka dalam membangun infrastruktur dan menginisiasi atraksi wisata. Namun, terdapat pula penilaian kritis yang menunjukkan masih lemahnya perhatian terhadap pengembangan aspek budaya lokal dan ekonomi kreatif.

Sementara itu, sanksi dalam konteks pengembangan Kampung Wisata Okura lebih banyak berupa sanksi positif seperti penghargaan. POKDARWIS, misalnya, telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah daerah dan kementerian. Di sisi lain, beberapa kelompok seperti Kelompok Siraja Panjang, Kelompok Tarian Badeo Kayangan, dan Kelompok PIRLI belum menerima sanksi positif maupun negatif, yang

menunjukkan belum adanya sistem evaluasi yang formal terhadap kinerja mereka. Ini menandakan adanya ketimpangan dalam pengakuan terhadap kontribusi *stakeholder* tertentu.

3. Kedudukan Orang-Orang dalam Perilaku Pengembangan Kampung Wisata Okura melibatkan berbagai *stakeholder* yang memiliki kedudukan strategis sesuai dengan kapasitas, wewenang, serta bidang tugas masing-masing. Berdasarkan hasil analisis, peran dan posisi partisipan dalam pengelolaan wisata ini tidak bersifat seragam, namun saling melengkapi dalam kerangka kolaborasi lintas sektor.

POKDARWIS Taman Bunga Impian Okura menempati posisi paling sentral sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata. Legalitas formal yang diperoleh dari SK Lurah menguatkan peran mereka sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus implementer dalam pengembangan destinasi wisata.

Lurah Kelurahan Tebing Tinggi Okura berperan sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi antara masyarakat dengan berbagai *stakeholder* lain. Kedudukan ini penting dalam memastikan harmonisasi program-program pengembangan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berlaku.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki posisi sebagai pembuat kebijakan sekaligus fasilitator dalam pengembangan wisata lokal. Dinas ini bertanggung jawab dalam legalisasi pembentukan POKDARWIS dan memberikan pembinaan teknis secara berkala. Sedangkan Dinas Pariwisata Provinsi Riau juga memainkan peran sebagai fasilitator dan akselerator melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kontestasi Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) di tingkat provinsi.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Tenayan menjalankan perannya

melalui program CSR, yang secara praktis menempatkan mereka sebagai fasilitator, implementer, sekaligus akselerator dalam penyediaan infrastruktur wisata. Kontribusi mereka mendukung percepatan pembangunan fisik, meskipun tidak berada dalam jalur pengambilan kebijakan inti.

Pihak akademisi dari UNILAK mengambil posisi sebagai akselerator yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM lokal, khususnya dalam pelatihan pembuatan konten promosi wisata. Peran ini mendukung perluasan jangkauan promosi Kampung Wisata Okura secara digital.

Media lokal, seperti Riau Televisi, juga berperan sebagai fasilitator dan akselerator, terutama dalam memperluas eksposur Kampung Wisata Okura kepada masyarakat luas melalui liputan dan publikasi. Meskipun tidak terlibat dalam aspek teknis atau kebijakan, peran media penting dalam mempercepat pertumbuhan citra destinasi.

Sementara itu, kelompok seni dan budaya seperti Kelompok Kompang dan Silat Siraja Panjang serta Kelompok Tarian Badeo memiliki kedudukan sebagai pelestari budaya sekaligus akselerator pengembangan wisata berbasis tradisi lokal. Meskipun kontribusi mereka nyata, namun belum sepenuhnya diakomodasi secara struktural dalam sistem kelembagaan wisata.

Di sisi lain, kelompok ekonomi kreatif seperti Kelompok PIRLI Pengrajin Lidi Sawit mengambil peran sebagai fasilitator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kerajinan lokal. Mereka menciptakan nilai tambah dari potensi lokal namun belum terintegrasi optimal dalam ekosistem wisata.

Secara umum, hasil temuan ini menunjukkan bahwa kedudukan *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura bersifat dinamis dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Terdapat pembagian peran yang cukup jelas antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis, fasilitator, serta akselerator. Namun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dan pengakuan yang



lebih formal terhadap kelompok masyarakat berbasis budaya dan ekonomi kreatif agar kontribusi mereka dapat terlembagakan secara optimal. Dengan keterlibatan yang sinergis, pengembangan Kampung Wisata Okura berpotensi untuk tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

4. Kaitan Antara Orang dengan Perilaku

Hubungan antara kedudukan dan perilaku *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura menunjukkan bahwa peran yang dijalankan oleh setiap aktor sangat dipengaruhi oleh posisi formal maupun sosial yang mereka miliki, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat legitimasi kelembagaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK), *Memorandum of Understanding* (MoU), ataupun penugasan kelembagaan, pelaksanaan peran para *stakeholder* lebih sering ditentukan oleh inisiatif pribadi, koordinasi informal, serta keterbatasan anggaran dan regulasi.

POKDARWIS sebagai pengelola utama menunjukkan pola peran yang berbasis kolektivitas dan responsif terhadap peluang kerja sama. Legalitas formal melalui SK dan MoU dengan PT PLN Nusantara Power memberikan mereka ruang gerak dalam membangun fasilitas wisata, namun implementasi program tetap disesuaikan melalui musyawarah internal. Hal serupa juga terjadi pada Lurah Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang menjalankan peran sebagai fasilitator dan penghubung lintas *stakeholder*. Meskipun tidak memiliki dana desa, inisiatif lurah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pihak eksternal menjadi bentuk nyata kontribusinya dalam pengembangan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau memainkan peran berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan kepariwisataan. Namun, keterbatasan regulasi dan anggaran menyebabkan kontribusi mereka lebih bersifat inisiatif, belum sepenuhnya sistematis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dinas Kota berupaya mendukung pengembangan dengan

pelatihan dan pembangunan simbol wisata, sedangkan Dinas Provinsi lebih berfokus pada pembinaan non-fisik serta fasilitasi melalui mitra CSR karena keterbatasan kewenangan dalam bantuan infrastruktur langsung.

Pihak swasta seperti PT PLN Nusantara Power menjalankan peran berbasis pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Mereka menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan fasilitas wisata berdasarkan kebutuhan dan potensi keberlanjutan program yang diajukan masyarakat. Peran ini bersifat fleksibel dan berorientasi pada dampak jangka panjang yang terukur.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Lancang Kuning menunjukkan peran sebagai akselerator dalam pengembangan promosi wisata digital, yang menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dalam kerangka tridharma perguruan tinggi. Peran media seperti Riau Televisi juga signifikan sebagai fasilitator penyebaran informasi yang mampu meningkatkan eksposur destinasi wisata, terutama saat momen strategis seperti libur panjang.

Kelompok-kelompok budaya dan ekonomi kreatif lokal seperti Kelompok Kompang dan Silat Siraja Panjang, Tarian Badeo, serta Kelompok PIRLI menunjukkan bahwa peran mereka sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi, kepedulian terhadap warisan budaya, dan semangat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Namun, minimnya dukungan promosi dan pelatihan manajemen kepariwisataan menjadi kendala dalam mengembangkan peran mereka secara optimal sebagai daya tarik wisata unggulan.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara kedudukan dan perilaku *stakeholder* menunjukkan bahwa pengembangan Kampung Wisata Okura berlangsung dalam dinamika kolaboratif yang dipengaruhi oleh faktor struktural (regulasi, legalitas, kewenangan) dan situasional (inisiatif pribadi, ketersediaan anggaran, peluang kemitraan). Hal ini menandakan bahwa penguatan sinergi antar aktor, pengembangan kebijakan yang lebih responsif, dan penyediaan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan menjadi

kunci dalam menciptakan sistem pariwisata yang inklusif, partisipatif, dan berdaya saing.

Kendala dalam Pengembangan Kampung Wisata Okura.

1. Keterbatasan Anggaran

Kendala dalam aspek pendanaan menjadi hambatan paling umum dan merata yang dirasakan hampir oleh seluruh *stakeholder*, baik dari unsur pemerintah, komunitas, hingga pelaku seni dan usaha lokal. Keterbatasan anggaran menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program-program pengembangan wisata, termasuk perawatan objek wisata, penyediaan fasilitas dasar, serta pelaksanaan pelatihan dan promosi yang berkelanjutan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi POKDARWIS yang mayoritas anggotanya tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang pertanian atau pengelolaan wisata. Demikian pula, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih kekurangan tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan sektor kepariwisataan, sehingga strategi yang dirancang belum mampu diimplementasikan secara optimal di lapangan.

3. Keterbatasan Legalitas dan Peraturan

Hambatan dari sisi legalitas dan regulasi turut memperlambat dinamika pengembangan kampung wisata ini. Belum adanya regulasi spesifik yang mengatur secara teknis peran *stakeholder* di tingkat kelurahan membuat intervensi dari pemerintah provinsi menjadi terbatas. Di samping itu, kelompok-kelompok pelaku seni dan ekonomi kreatif juga belum memiliki pengakuan hukum yang sah, sehingga kesulitan dalam mengakses bantuan atau menjalin kerja sama yang lebih luas.

4. Keterbatasan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat dalam sektor ekonomi kreatif turut menjadi faktor yang memperlambat proses pengembangan. Potensi yang dimiliki masyarakat lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan terdapat kecenderungan keengganan untuk terlibat aktif dalam memproduksi dan memasarkan produk khas wisata. Bahkan ketika sudah ada dukungan dan pelatihan, pemanfaatannya belum maksimal akibat ketidakjelasan skala prioritas di tingkat komunitas.

5. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur, terutama yang menunjang aktivitas kelompok seni dan budaya, semakin memperlemah nilai tambah sektor wisata budaya. Banyak kelompok seni mengalami kekurangan alat pertunjukan, busana, hingga ruang ekspresi yang layak. Akibatnya, mereka tidak memiliki wadah untuk tampil secara reguler dan berkontribusi secara signifikan terhadap atraksi wisata di Kampung Wisata Okura.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menekankan bahwa keberhasilan pengembangan Kampung Wisata Okura sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi antar *stakeholder* dapat ditingkatkan dan difasilitasi melalui kebijakan yang inklusif, pendampingan yang konsisten, serta dukungan yang merata pada seluruh aspek pengembangan wisata. Tanpa adanya upaya kolaboratif dan strategis dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, maka potensi wisata berbasis budaya dan masyarakat di Kampung Wisata Okura akan sulit berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura, khususnya dalam aspek pemberdayaan komunitas budaya dan pelaku ekonomi kreatif lokal, belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat sejumlah pihak yang telah berkontribusi, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, media,



dan masyarakat, namun peran tersebut masih cenderung berpusat pada aspek fisik dan infrastruktur wisata yang terdapat di Objek Wisata Taman Bunga Impian Okura, sementara itu penguatan kapasitas dan pelibatan aktif komunitas budaya dan ekonomi kreatif belum mendapat perhatian dari para *stakeholder*..

Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap satu daya tarik wisata, yaitu Objek Wisata Taman Bunga Impian Okura, tanpa adanya diversifikasi yang memadai terhadap potensi lokal lainnya seperti seni tradisional kompiang dan silat, kerajinan lidi sawit, serta atraksi budaya lainnya. Padahal, keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat lokal merupakan modal penting dalam membangun daya tarik wisata yang autentik dan berkelanjutan.

Beberapa kendala yang menghambat optimalisasi peran *stakeholder* dalam pengembangan Kampung Wisata Okura di antaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan legalitas dan peraturan, keterbatasan kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

Maka dari itu melalui penelitian ini kemudian penulis merekomendasikan agar pengembangan Kampung Wisata Okura tidak hanya berfokus pada satu objek wisata, tetapi lebih mengintegrasikan potensi budaya dan ekonomi kreatif lokal. Oleh karena itu, *stakeholder* diharapkan dapat memperluas cakupan program pengembangan yang melibatkan komunitas seni, kerajinan, dan masyarakat secara aktif.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, perlu dibangun kolaborasi yang lebih luas dengan pihak swasta dan investor potensial. Pemerintah daerah juga disarankan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar pengembangan kampung wisata memperoleh dukungan yang lebih maksimal. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan, baik bagi POKDARWIS maupun pegawai pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan kepariwisataan.

Sementara itu, guna menjawab kendala legalitas, disarankan agar kelompok seni dan pengrajin diberikan pengakuan formal melalui Surat Keputusan dari pihak pemerintah agar akses terhadap bantuan lebih terbuka. Terakhir, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dibutuhkan pendekatan edukatif dan fasilitasi kegiatan yang dapat membangkitkan rasa kepemilikan terhadap keberlanjutan kampung wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2021). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 40. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.3> 9-55
- Firdausi, F. N., & Ananda, F. (2025). Peran Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi Kasus UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)*, 23(1), 41–52.
- Ginting Grace, Kismartini, Yuningsih Tri, A. T. (2021). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *Perspektif*, 11(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5225>
- Goa, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. (N. A. Munandar (ed.); Issue 6). CV. Media Sains Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In H. Salmon (Ed.), *SAGE Publication, Inc* (3rd ed., Issue 8). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Pardede, D. W., Sitepu, Y. K. ., Sitio, R. J. T., Silalahi, M., & Simbolon, R. (2023). Partisipasi Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengembangan Desa Wisata Meat



- Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(4), 159–171. <https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakarya.v1i4.1469>
- Putri, C. S., & Jatiningsih, O. (2020). Pelaksanaan Peran Pkk Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. *Ejournal.Unesa*, 08(03), 887–901. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/36233>
- Rosa, R. R., Radian Salman, Sri Winarsi, Wilda Prihatiningtyas, & Giza'a Jati Pamoro. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 313–327. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18408>
- Sari, E. D. K. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Praktis* (P. A. W. Surwaryo (ed.); 1st ed.). PT. Peno Persada Kerta Utama.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial* (17th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>